



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : F. MARIA DAMAYANTI HANDAYANI
2. Jabatan : AUDITOR
3. NHK : 425613

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 507.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/77 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 507.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 239.000.000

1. MOBIL, HONDA CITY GM 2 1.5. E AT SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY NC11C1C A/T SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO E1F02N12M2 A/T SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOBIL, SUZUKI PICKUP Tahun 2019, LAINNYA Rp. 137.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 39.000.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 518.184.114

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.303.684.114

**III. HUTANG** Rp. 625.540.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 678.144.114

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.